



*Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2016-2021*



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2018**





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan Inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program, dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2021.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan oleh karenanya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan sehingga Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara pada gilirannya nanti dapat dilakukan secara optimal.

Kepala Pelaksana,

Drs. H. MARSIDIK

NIP. 19620403 198703 1 020



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGNISASI PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Kaltim.....	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)	49
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	88
BAB VIII PENUTUP.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan.....	23
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan.....	23
3	Jumlah Pejabat Struktural.....	24
4	Jumlah Tenaga Honor/Tenaga Harian Lepas Menurut Tingkat Pendidikan	24
5	Jumlah Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan.....	24
6	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dimiliki Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	25
7	Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat Dan Roda Enam yang Dimiliki Oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara.....	26
8	Sarana dan Prasarana berupa asset / tanah / peralatan/perengkapan	29
9	Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	29
10	Anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah.....	38
11	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	45
12	Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.....	48
13	Tujuan dan sasaran perangkat daerah.....	58
14	Faktor Internal dan eksternal.....	59
15	Penghitung bobot dan rating.....	60
16	Strategi dan kebijakan Jangka menengah BPBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	64
17	Rencana Program, Kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.....	69
18	Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	89
19	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	22
2	Peta Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara	54
3	Diagram SWOT.....	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyusun suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni“ **Menuju Masyarakat Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,**



Sejahtera dan Berkeadilan”. Proses penyusunan dokumen renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017. Dalam penyusunan Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Perubahan Rencana Strategis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang akan di evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.2. Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2017 - 2021 sebagai berikut:

- 1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 9) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 13) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2017 - 2021 ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasional untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana strategis ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Strategis disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk RPJMD.



4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Memudahkan aparatur dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan perangkat pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Kaltim
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain ;(a) *Melindungi masyarakat...*” dan (b) *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat....*“ Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1)



Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.1.1. Tugas

a. Pra bencana

Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
4. Melakukan koorBadani pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Melakukan koorBadani pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana;
dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:

1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini

b. Tanggap Darurat

Saat tanggap darurat, bertugas:

- a) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 1. Pencarian dan penyelamatan korban;
 2. Pertolongan darurat; dan
 3. Evakuasi korban dan harta benda.
- b) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 2. Pangan;
 3. Sandang;
 4. Penampungan dan tempat hunian



c. Pasca Bencana

Pasca bencana tugas meliputi;

1. Rehabilitasi;
 - 1) Pendataan
 - 2) Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - 3) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 4) Perbaikan prasana dan sarana umum;
 - 5) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 6) Pemulihan sosial psikologis;
 - 7) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 8) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - 9) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 10) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 11) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Rekonstruksi
 - 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 3) Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - 5) Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

2.1.2. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **PengkoorBadanian**, yang merupakan fungsi koorBadani yang dilaksanakan melalui kegiatan koorBadani dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

- b) **Pengkomandoan**, yang merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.



- c) **Pelaksana**, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabat oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Unsur Pengarah terdiri dari unsur-unsur yang berasal dan mewakili OPD terkait di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian lagi berasal dan mewakili masyarakat profesional yang memiliki kompetensi dan ahli di bidang kebencanaan. Sedangkan Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, dengan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana ;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan;



2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- d) Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 2. Sub Bidang Logistik;
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- f) Kelompok Jabatan fungsional

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Bupati Kutai Kartanegara mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu Sekretaris dan empat kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

- a) Tata Kerja Kepala Pelaksana, yang meliputi :
 1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
 2. Merumuskan kebijakan teknis Badan;
 3. Merumuskan rencana program kerja Badan
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan
 5. Merumuskan kebijakan administrasi Badan
 6. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Badan
 7. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
 8. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
 9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM urusan Kepala Badan; dan
 10. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Tata Kerja Sekretaris , yang meliputi :



1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Simtem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
8. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan Badan
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan



- c) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi :
1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan Ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi: menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan, *survey index* kepuasan masyarakat, *survey internal* organisasi dan *survey index* nilai persepsi korupsi;
 6. Melaksanakan administrasi umum meliputi: ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
 8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum dan Ketatalaksanaan; dan
 9. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi :
1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan



- Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN / LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 5. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP urusan Kepegawaian;
 6. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
 7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
 8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi :
1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui sekretaris Badan;
 4. merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
 5. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
 6. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 8. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



- f) Tata Kerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi :
1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana dan prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
 4. Mengkoordinasikan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana dan prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
 5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 6. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan latihan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 8. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 9. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- g) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Pencegahan meliputi :
1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. menyusun rencana kegiatan urusan Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait urusan Pencegahan;
 4. Merencanakan dan melaksanakan Inspeksi Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran Bagi Bangunan Gedung;
 5. Merencanakan dan melaksanakan Inspeksi Penggunaan Peralatan Pemadam Api Ringan (APAR);
 6. Merencanakan dan membuat Rencana Kontijensi Bencana, Peta Rawan Bencana, Peta Rawan Kebakaran Perumahan dan Pemukiman;
 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pencegahan;



8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pencegahan;
9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan; dan
10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

h) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan meliputi :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait urusan kesiapsiagaan;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penanggulangan bencana dan kebakaran;
5. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kesiapsiagaan;
7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kesiapsiagaan;
8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesiapsiagaan; dan
9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

i) Tata Kerja Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik meliputi :

1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kedaruratan dan logistik meliputi Kedaruratan dan logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja dengan stakeholder di bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



5. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kedaruratan dan logistik;
6. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kedaruratan dan logistik;
7. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan dan logistik; dan
8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

j) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Kedaruratan meliputi:

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan;
4. merencanakan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops);
5. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan kedaruratan pada saat keadaan darurat dan penanganan pengungsi;
6. merencanakan kegiatan dan pengerahan petugas penyelamatan pada saat darurat bencana dan kebakaran;
7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kedaruratan;
8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kedaruratan;
9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan; dan
10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

k) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Logistik meliputi :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan logistik pada saat darurat bencana dan kebakaran;
4. merencanakan kegiatan Pengelolaan dan Pendistribusian Dukungan Logistik;



5. merencanakan kegiatan dan pengerahan petugas Pendistribusian Dukungan Logistik pada saat darurat bencana dan kebakaran;
6. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Logistik;
7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Logistik;
8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Logistik;
9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

l) Tata Kerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana dan pasca kebakaran;
4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitas dan rekonstruksi pada pasca bencana dan pasca kebakaran;
5. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
7. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

m) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Rehabilitasi meliputi :

1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan rehabilitasi pasca bencana dan pasca kebakaran;
4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan rehabilitasi pasca bencana dan pasca kebakaran;



5. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rehabilitasi;
6. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rehabilitasi;
7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi; dan
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

n) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Rekonstruksi meliputi :

1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan rekonstruksi pasca bencana dan pasca kebakaran;
4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan rekonstruksi pasca bencana dan pasca kebakaran;
5. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rekonstruksi;
6. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rekonstruksi;
7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rekonstruksi; dan
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

o) Tata Kerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meliputi :

1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemadam Kebakaran meliputi Oprasional dan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran Perumahan dan Permukiman;
4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pemadam Kebakaran Perumahan dan Permukiman;
5. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran;



6. Mengkoordinasikan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan Serta Personil pada saat pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan permukiman, serta penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
7. Mengkoordinasikan rencana dan penentuan teknis kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) personil petugas pemadam kebakaran perumahan dan permukiman;
8. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemadam Kebakaran;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemadam Kebakaran;
10. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemadam Kebakaran; dan
11. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

p) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Oprasional meliputi :

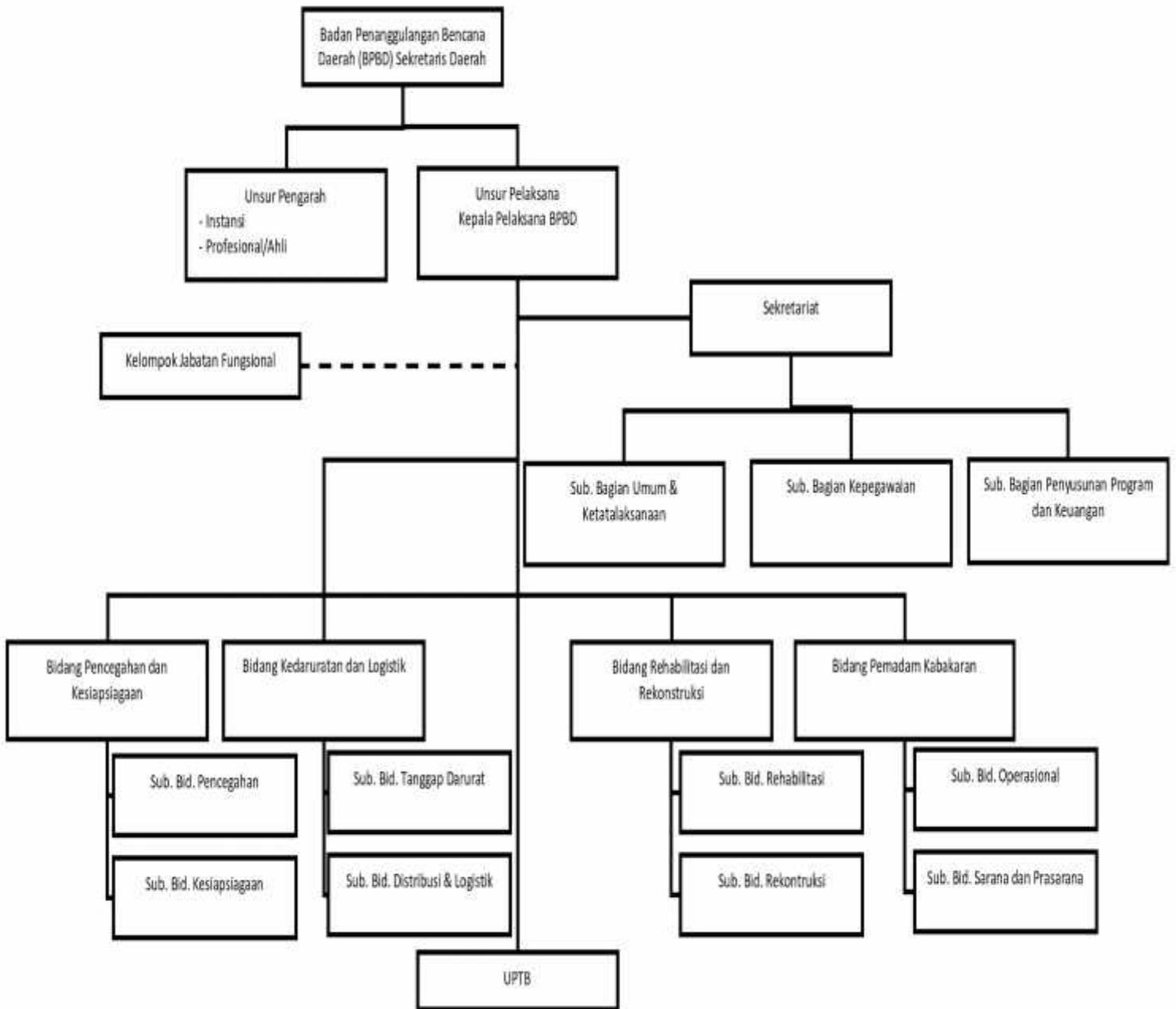
1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Oprasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan Oprasional;
4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan Oprasional;
5. Merencanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan Serta Personil pada saat pemadaman kebakaran, pengendalian kebakaran perumahan dan permukiman, dan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
6. Merencanakan dan menentukan teknis kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) personil petugas pemadam kebakaran perumahan dan permukiman;
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Oprasional;
8. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Oprasional;
9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Oprasional; dan
10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



- q) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana meliputi:
1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 2. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan Sarana dan Prasarana;
 4. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan Sarana dan Prasarana;
 5. merencanakan kegiatan dan menganalisis kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran;
 6. Merencanakan kegiatan dan menentukan teknis pengadaan kebutuhan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan Sarana dan Prasarana kebakaran perumahan dan permukiman;
 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Sarana dan Prasarana;
 8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Sarana dan Prasarana;
 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sarana dan Prasarana; dan
 10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- r) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku



Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara :



Gambar.1. Struktur Perangkat Daerah BPBD

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian BPBD



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	-	-	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	3	-	3
5.	Pembina	IV/A	5	-	5
6.	Penata Tingkat I	III/D	6	1	7
7.	Penata	III/C	5	3	8
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	3	-	3
9.	Penata Muda	III/A	4	-	4
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	8	1	9
11.	Pengatur	II/C	23	5	28
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	17	5	22
13.	Pengatur Muda	II/A	7	-	7
14.	Juru Tingkat I	I/D	2	-	2
15.	Juru	I/C	-	-	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	2	-	2
17.	Juru Muda	I/A	-	-	0
	Jumlah		85	15	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	9	-	9



3.	Sarjana (S1)	17	4	21
4.	Sarjana Muda	1	-	1
5.	SLTA/SMU	53	11	64
6.	SLTP	1	-	1
7.	Sekolah Dasar	4	-	4
Jumlah		85	15	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II/B	-	-	-
2.	Eselon III/A	1	-	1
3.	Eselon III/B	3	-	3
4.	Eselon IV/A	8	1	9
Jumlah		12	1	13

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 4. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	32	10	42
4.	Sarjana Muda	3	1	4
5.	SLTA/SMU	152	16	168
6.	SLTP	7	-	7
7.	Sekolah Dasar	3	-	3
Jumlah		197	27	224

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 5. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	



5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	

Sumber Data : Seksi Diklat

b. Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut :

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2.	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
	JUMLAH	8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 8. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	
		1	Kurang Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompore Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili	1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	
88.	Compressor	1	Baik	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
89.	FilterCompressor	5	Baik	
90.	Minyak nabati	8	Baik	
91.	Mesin Boat	3	Baik	
92.	Rubber Boat	2	Baik	
		1	Kurang Baik	
93.	Speed Boat dan Mesin	1	1	
94.	Tangki BBM	3	3	
95.	Life Jacket	5	5	
96.	Badan Ces	1	Kurang Baik	
97.	Mesin Ces	1	Baik	
98.	Tenda	2	Baik	
		5	Kurang Baik	
99.	Tali	3	3	
100	Velm Bed	23	Baik	
		1	Kurang Baik	
101	Kantong mayat	21	21	
102	Tandu	1	1	
103	Terpal	9	9	



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 9.
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500	700	950	900	150	700	950	900	30	100	100	100	100	83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4	7	7	12	4	7	7	12	100	100	100	100	89,99	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30	60	5	5	20	60	5	4	67	100	100	80	95	87%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12	29	12	12	9	29	12	12	75	100	100	100	100	94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Badan/Operasional				0	25	9	27	0	17	9	72		68	100	267	100	145%
Penyediaan Alat Tulis Kantor				46	62	1	1	46	62	1	1	100	100	100	100	98,99	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				55	200	29	74.585	26	200	29	104709	47	100	100	140	98,67	97%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				348	11680	11680	2190	188	7358	11680	2190	54	63	100	100	98,82	79%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	27	1	1		23	1	1		85	100	100	99,96	95%
Penyediaan Makanan dan Minuman				600	7920	1584	1584	600	3802	1584	1201	100	48	100	76	98,87	81%
Rapat-Rapat KoorBadani dan Konsultasi Ke Luar Daerah				12	49	49	49	9	37	49	2	75	76	100	4	100	64%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran				12	12		2	8	12		12	67	100		60	98,85	256%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				-	-	225	-	-	-	225			100				100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari tertentu				-	-	1	1	-	-	1	1		100	100	99		100%
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja				-	-	-	1	-	-		1			100			100%
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ^{9,5,6,7}				-	-	-	12	-	-		12				100		100%
Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana				-	-	-	225	-	-		225				100	100	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pembangunan Gedung Kantor				2	-	-	-	1	-	-	-	50					50%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				10	32	21	-	3	32	21	-	30	100	100			77%
Pengadaan Mebeleur				13	-	-	-	-	-	-	-						
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor				1	4	-	1	1	2	-	1	100	50		100	97,67	83%
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Badan/ operasional				16	25	45	46	8	22	45	43	50	88	100	93	100	83%
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				20	27	1	-	2	22	1	-	10	81	100			64%
Turap dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-	1	0	-	-	1	0	-		100				100%
Sarana dan prasarana Gedung Kantor Di Kecamatan (UPTD)				-	3	3	-	-	3	3	-		100	100			100%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Pengadaan Mobil Brawnier Untuk Kecamatan				-	3	-	-	-	3	-	-		100				100%
Perencanaan Pembangunan Gedung Pusdalop, Gudang BMD / Logistik				-	3	-	-	-	3	-	-		100				100%
Pengadaan 2 Unit Pemadam Kebakaran Desa Muara Muntai Ulu				-	2	-	-	-	2	-	-		100				100%
Pengadaan Kendaraan Badan/Operasional				-	-	10	-	-	-	10	-		100				100%
Pengadaan Mobil Penanggulangan Bencana				-	-	4	-	-	-	4	-		100				100%
Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor				-	-	1	-	-	-	1	-		100				100%
Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran				-	-	60	27	-	-	60	45		100	167	98,87		133%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kedaruratan				-	-	0	-	-	-	0	-						
Semenisasi Halaman Garasi Gedung Kantor				-	-	0	-	-	-	0	-						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Badan Beserta Kelengkapannya				-	247	-	-	-	247	-	-		100				100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				164	298	0	-	-	298	0	-		100				100%
Pengadaan Pakaian kerja lapangan				-	-	100	-	-	-	100	-		100				100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal				22	-	-	-	3	-	-	-	14					14%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur				-	20	20	-	-	20	20	-		100	100			100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	-	-	-	-	-	-	-						
Penyusunan Dokumen Renstra				-	-	-	-	-	-	-	-					100	
Penyusunan Laporan Keuangan				-	-	-	-	-	-	-	-					100	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	600	50	50	-	600	50	50		100	100	100		100%
Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, TAPKIN, RKA/DPA Dan Profil BPBD				-	600	100	50	-	600	100	50		100	100	100		100%
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Internal SKPD				-	34	30	17	-	34	30	17		100	100	100		100%
Review Renstra				-	1	-	-	-	-	-	-						
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga				-	2	0	-	-	1	0	-		50				50%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				-	-	0	-	-	-	0	-						
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				-	-	0	25	-	-	0	25				100		100%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				-	-	-	-	-	-	-	-						
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran				-	2	-	-	-	2	-	-		100				100%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				-	-	-	-	-	-	-	-						



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Kantor BPBD				-	1	-	-	-	1	-	-		100				100%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																	
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran				1	-	-	-	1	-	-	-	100					100%
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran				300	-	-	-	150	-	-	-	50					50%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Bahaya kebakaran				-	-	-	-	-	-	-	-						
Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran				-	-	-	-	-	-	-	-						
Monitoring, evaluasi dan pelaporan				1	-	-	-	-	-	-	-						
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																	
Pemantauan dan penyebarluasan informasi				18	-	-	-	-	-	-	-				97,99		
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana Alam				138	-	-	-	23	-	-	-	17					17%
Fasilitasi penanggulangan bencana				33	-	-	-	33	-	-	-	100					100%
Latihan SAR				28	-	-	-	28	-	-	-	100					100%
Sosialisasi dan Penyuluhan kebencanaan				-	-	-	-	-	-	-	-						
Gladi lapangan penanggulangan Bencana				500	-	-	-	-	-	-	-						
KoorBadani penanggulangan bencana				15	-	-	-	15	-	-	-	100					100%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bencana				-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan sarana dan prasarana logistik untuk korban bencana				-	-	-	-	-	-	-	-						
Pembelajaran penanggulangan bencana				-	-	-	-	-	-	-	-						
Fasilitasi dan evaluasi pasca bencana pelaksanaan rehabilitasi				-	-	-	-	-	-	-	-						
Fasilitasi dan evaluasi pasca bencana pelaksanaan rekonstruksi				-	-	-	-	-	-	-	-						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana																	
Latihan Dasar SAR / Lanjutan				-	25	-	-	-	25	-	-		100				100%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana				-	600	-	-	-	600	-	-		100			100	100%
Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan				-	300	300	18	-	300	300	18		100	100	100		100%
Fasilitasi KoorBadani Pencegahan dan Kesiapsiagaan Keluar Daerah				-	600	19	100	-	600	19	7		100	100	7		69%
Pembentukan Siaga Bencana (Balakarcana) Di Kecamatan				-	200	250	-	-	200	250	-		100	100			100%
Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana				-	1	-	-	-	-	-	-						
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)				-	1	-	-	-	1	-	-		100				100%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana				-	1	-	-	-	1	-	-		100				100%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Apel Kesiapsiagaan				-	2	-	-	-	1	-	-		50				50%
Pemantauan Daerah Rawan Bencana				-	-	18	-	-	-	18	-			100			100%
Rapat KoorBadani Kebencanaan				-	-	80	-	-	-	80	-			100			100%
Pembuatan Peta Rawan Bencana				-	-	1	-	-	-	1	-			100			100%
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana																	
Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana				-	7	4	4	-	6	4	4		86	100	100		95%
KoorBadani Penanggulangan Bencana				-	33	40	30	-	33	40	60		100	100	200	97,99	133%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan				-	6	-	-	-	5	-	-		83				83%
Fasilitasi Penanggulangan Bencana				-	50	40	20	-	50	40	73		100	100	365		188%
Rapat KoorBadani Penanganan Bencana				-	36	-	-	-	36	-	-		100				100%
Pengadaan Peralatan Pusdalop				-	8	-	-	-	8	-	-		100				100%
Pendistribusian logistic dan peralatan korban bencana /kecelakaan				-	-	0	-	-	-	-	-						
Tanggap Darurat Bencana Kebakaran																98,94	
Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam																97,99	
Optimalisasi TRC																96,97	
Pengerahan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar																97,99	
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana																	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana					18	0	-	-	-	-	-						
Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi				-	400	-	-	-	400	-	-		100				100%
Verifikasi Pasca Bencana				-	30	3	1	-	30	3	1		100	100	100		100%
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat				-	-	0	-	-	-	0	-					95,74	
Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				-	-	350	-	-	-	350	-			100		-	100%
Verifikasi dan Pendataan Pasca Bencana																95,74	
Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana																-	
Monev atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja sosial tidak terencana																95,74	
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																	
Pemeriksaan Alat Damkar																	-
Simulasi Pemadam Alat api ringan tk.pelajara																	-
KoorBadani pengawasan pengendalian operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran																	99,89
Program Penanggulangan Bencana Kebakaran																	
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bebakaran Tingkat Dasar				-	22	-	-	-	22	-	-		100				100%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Capaian Akhir periode
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Lanjutan				-	21	-	-	-	21	-	-		100				100%
Pengamanan Hari-hari tertentu				-	4	3	-	-	4	3	-		100	100			100%
Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				-	15	69	70	-	15	69	85		100	100	121		107%
Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran (Kecamatan/ SKPD/ orang)				-	18	53	225	-	18	53	18		100	100	8		69%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran (kecamatan)				-	2	-	-	-	2	-	-		100				100%
Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Macam)				-	18	-	-	-	18	-	-		100				100%
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Lanjutan Dan Inspektur				-	-	0	-	-	-	0	-						
CAPAIAN RATA-RATA PER TAHUN												65	93	100	127		96%

Tabel 10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					REALISASI KEUANGAN %				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.834	5.205	5.510	4.170		1.573	4.048	5.066	3.994		85,79%	77,79%	91,94%	95,77%	99,37%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.100	14.412	10.240	1.444		5.283	12.048	9.434	1.424		86,60%	83,59%	92,12%	98,65%	79,98%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	210	684	397			204	658	277			96,98%	96,18%	69,67%		100%
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206	294	294			163	200	282			78,98%	68,02%	95,73%		100%
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	272	948	1.493	247		178	752	1.434	247		65,47%	79,25%	96,01%	99,90%	99,55%
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		75					75					100,%			-
8	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		7.305					1.128					15,45%			-
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					250					81,35 1,100					95,74%
9	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.666					2.436					91,38%				33,30%
11	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	4.548					3.342					73,50%				65,59%
12	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		3.126	2.545	925			2.141	2.178	833			68,51%	85,58%	90,04%	-
13	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		3.056	1.330	-			2.827	1.315	1.072			92,51%	98,88%		97,94%
14	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		1.484	984	398			775	828	398			52,23%	84,15%	100,%	95,74%
15	Penanggulangan Bencana Kebakaran / Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		2.814		1.115			2.705		1.113			96,12%		99,82%	33,30%
	Jumlah	15.835	39.404	22.794	8.299		13.178	27.358	20.813	9.081						



Adapun program dan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

- a. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB belum tersedia
- b. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk Perbub juga belum tersedia
- c. Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Perbub 0% persen.
- d. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana belum semua ada disemua kecamatan.
- e. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum memadai baru terpenuhi 71,43 dari kebutuhan 100 persen.
- f. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 54,17 persen.
- g. Desa Tangguh Bencana belum seluruhnya ada. Dari 6474 kampungatau desa yang ada di Kutai Kartanegara 2600 desa 37,07 persen yang baru tersentuh.
- h. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan juga masih nol persen
- i. Rencana Kontijensi Banjir yang seharusnya ada di tiap Kecamatan.
- j. Demikian juga Rencana Kontijensi banjir, Kebakaran Lahan dan Hutan, banjir bandang juga belum memadai seharusnya dimiliki satu minimal oleh setiap Kecamatan
- k. Penentuan Status Tanggap Darurat juga perlu didorong

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Gerbang Raja Tahap II sebagai grand strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui Gerbang Raja II penataan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga lebih dimatangkan.

Semakin disadari dampak dari bencana serta meningkatnya kuantitas bencana dari tahun-ke tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan



Penanggulangan Bencana Daerah yang diharapkan menjadi Organisasi Perangkat Daerah sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Gerbang Raja Tahap II Tahun 2016-2021, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas penanggulangan bencana di daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana serta pemahaman terhadap kesiapsiagaan ;
2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penanggulangan bencana.
4. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;
5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.

b. Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih terbuka sangat lebar, banyaknya bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik *dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana*. Dalam Tahap pra bencana, berupa Program dan kegiatan-kegiatan yang



bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat bencana, penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal, berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban . Setelah semua teratasi, dimulailah Tahap pasca bencana untuk Rehabilitasi, Rekonstruksi dan pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan pelayanan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.
2. Sinkronisasi dan koorBadani yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya.(pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan).
3. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana.
4. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena



yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang sebelumnya bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik



secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
 - a) Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan Kebakaran dan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
 - c) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana
 - d) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
 - b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- c. Dalam aspek Ketugasan:
 - a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
 - c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - d) Masih minimnya relawan siaga bencana.
 - e) Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
 - f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.



- g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel. 11 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Indek Risiko Bencana	1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	a. Peraturan dan Pembentukan Forum PRB belum maksimal Belum tersedianya Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan b. Belum semua Kab/Kota memiliki Kebijakan Daerah tentang RPB
		2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan belum terpadu	Peta Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada belum tersedia secara optimal
		3. Belum berkembangnya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	a. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang belum menjangkau langsung masyarakat b. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/kota belum maksimal c. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha belum terlaksana maksimal d. Belum semua Kab/kota memiliki Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis e. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB belum dilakukan f. Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan g. Belum dilaksanakannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan h. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum maksimal i. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB belum tersistem dan terpadu j. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
		4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	a. Belum semua Sekolah dan Madrasah Aman Bencana b. Belum semua Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana c. Belum seluruh desa Tangguh Bencana
		5. belum efektifnya pencegahan dan mitigasi bencana	a. Belum efektifnya Penerapan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir b. Perlindungan daerah tangkapan air belum maksimal c. Restorasi Sungai belum maksimal d. Penguatan Lereng perlu peningkatan e. Belum optimalnya Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan f. Belum Optimalnya pemanfaatan air permukaan g. Pemantauan berkala hulu sungai belum berjalan h. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota belum optimal; i. Konservasi vegetative DAS rawan longsor belum maksimal



		6. Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum seluruh daerah memiliki Rencana Kontijensi Banjir b. Belum adanya Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami c. Penentuan Status Tanggap Darurat masih perlu pembenahan d. Penerapan sistem komando operasi darurat perlu dioptimalkan e. Masih rendahnya kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
		7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah b. Pemulihan infrastruktur penting c. Perbaikan rumah penduduk d. Pemulihan Penghidupan masyarakat

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 dalam masa kepemimpinannya adalah **“KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transpormasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing



daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta
8. penguatan perlindungan anak.

Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RPJMD 2016-2021, program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terdiri atas 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program penanggulangan bencana kebakaran
2. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4. Program tanggap darurat penanggulangan bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana
6. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan



3.3. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kaltim

Tabel. 12. Rencana Strategis BPBD Provinsi Kaltim Periode Tahun 2013-2018

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE TAHUN 2013 - 2018

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
							2014	2015	2016	2017	2018
1.	Melindungi Masyarakat Kalimantan Timur dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana	Penguatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Rasio penurunan indeks risiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Prosentase peningkatan jumlah desa/keurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	20	20	40	60	80
					Prosentase desa/keurahan tangguh bencana	%	0	20	50	70	100
2.	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi	Terlaksananya tanggap darurat yang responsif	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana	Respon Time tanggap darurat	Jam	72	72	60	54	48
					Prosentase Korban Bencana yang diberikan bantuan melalui BPBD Kab/Kota	%	75	80	85	85	85
3.	Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	Membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menurunnya penyandang masalah sosial pada masa pasca bencana	Terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk semua aspek pelayanan masyarakat	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	40	40	50	60	70



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara (2013 – 2033)

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat dari 9 (sembilan) satuan fisiografi, dengan diskripsi masing-masing satuan sebagai berikut :

1. Daerah rawa pasang surut (Tidak Swamp)

Adalah daerah dataran di tepi pantai yang selalu di pengaruhi oleh pasangsurut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove. Bentuk wilayahnya bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi.

2. Daerah dataran alluvial (Alluvial Plain)

Adalah daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan didaerah muara dan lereng-lereng bukit/pegunungan. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 2 (dua) meter. Luas satuan dataran alluvial ini adalah 2.251,19 Km² atau 8.62 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Daerah jalur kelokan sungai (Meander Belt),

Adalah daerah jalur meander sungai yang mempunyai tanggul sungai yang lebar. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaaan tinggi kurang dari 2 (dua) meter. Luas satuan jalur kelokan sungai ini adalah 1.400,93 Km² atau 5,36 % dari luas wilayah Kutai Kartanegara.



4. Daerah rawa (Swamp)

Adalah daerah dataran banjir yang selalu tergenang air, rawa bergambut atau dataran banjir berawa di lembah yang sempit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas rawa ini adalah 2.691,71 Km² atau 9,87 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Daerah lembah alluvial (Alluvial Valley)

Adalah daerah dataran di lembah atau di kiri-kanan jalan aliran sungai dengan berbukit atau tidak berbukit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 (satu) meter. Luas satuan lembah alluvial ini adalah 85,03 Km² atau 0,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Daerah teras (Terrain)

Adalah daerah berteras, baik yang dipengaruhi laut maupun teras berpasir yang datar dan tertutup gambut yang dangkal atau teras berpasir dengan bentuk wilayah bergelombang. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 8 % dan perbedaan tinggi kurang dari 10 (sepuluh) meter. Luas satuan teras ini adalah 880,22 Km² atau 3,37 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Daerah dataran (Plain),

Adalah daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuan beku asam dan dataran basalt. Bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit dengan variasi kelerengan kurang dan 2 - 40 % dan perbedaan tinggi kurang dari 50 (lima puluh) meter. Luas satuan dataran ini adalah 8.583, 13 Km² atau 32,86 % dan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



8. Daerah perbukitan (Hill)

Adalah daerah bukit endapan dan ultra basalt, satuan punggung sendimen, metamorf dan vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah bergelombang sampai agak berbukit. Luas satuan perbukitan ini adalah 4.123,64 Km² atau 15,79 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Daerah pegunungan (Mountain)

Adalah daerah gunung endapan basalt dan ultra basalt, gunung batu pasir dengan lereng terpotong, punggung dan gunung karet yang permukaannya tidak rata, satuan punggung granit dan metamorf dan gunung strato vulkanik yang tererosi dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah agak berbukit sampai bergunung dengan variasi kelerengan kurang dari 26 % sampai lebih dari 60 % dan perbedaan tinggi lebih dari 300 (tiga ratus) meter. Luas satuan pegunungan ini adalah 3.342,31 Km² atau 12,8 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

a. **Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:**

- a) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
- e) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan



f) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

b. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:

- a) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
- b) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.

c. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi:

- a) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
- b) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
- c) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
- d) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
- e) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.

d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:

- a) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

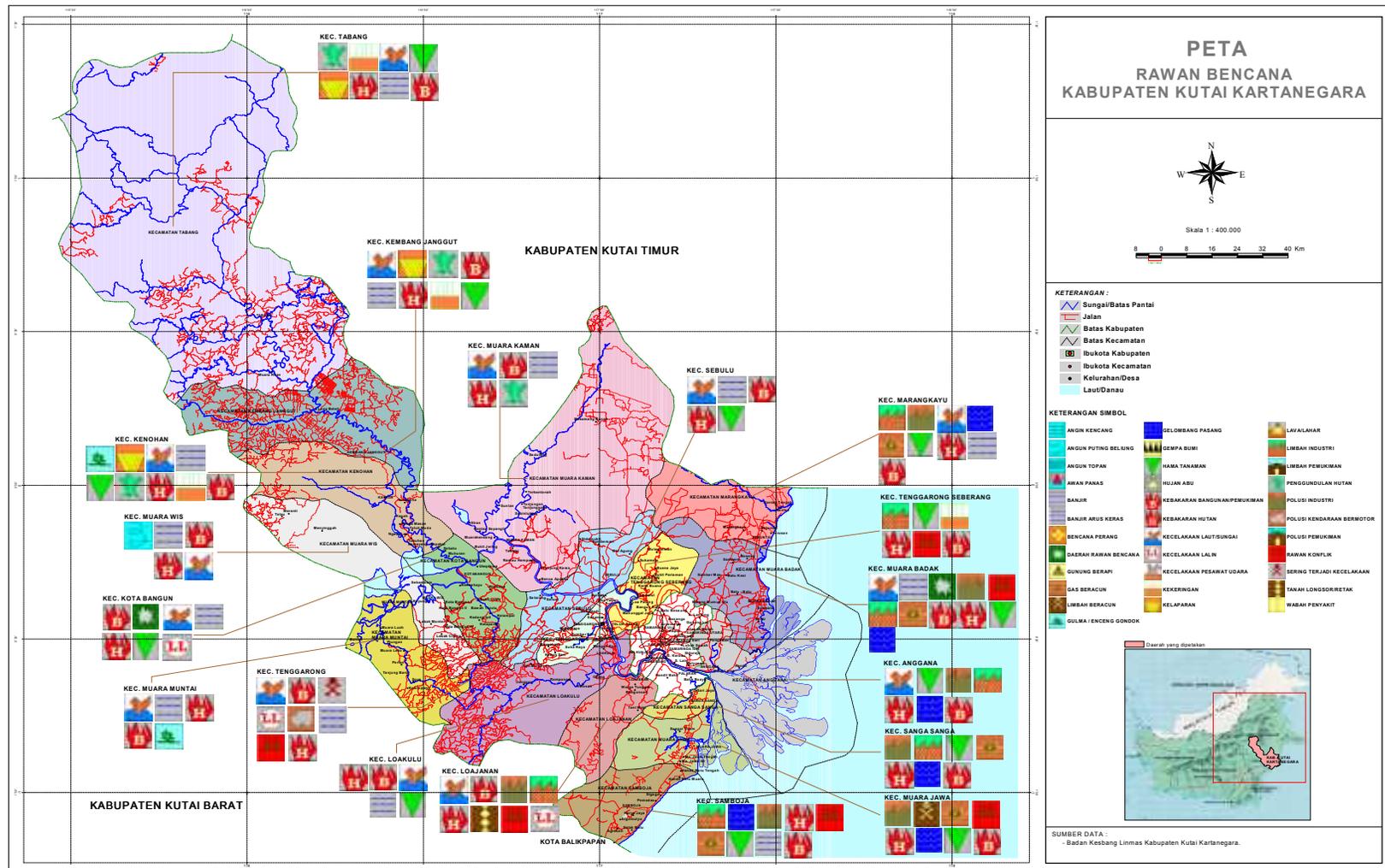


- b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Dalam melengkapi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penanggulangan bencana, disajikan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Gambar. 2. dibawah ini:



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Gambar. 2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara



3.5. Penentuan Isu - Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu - isu strategis penanggulangan bencana:

a. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, yaitu belum optimalnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjelasan atas isu tersebut adalah:

- a. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur sebagai penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja .
- b. Kondisi sarana dan prasarana yang masih belum memadai, terutama keberadaan kantor yang masih perlu renovasi .
- c. Belum konsistennya penataan kelembagaan internal penanggulangan bencana.
- d. Belum tersedianya sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi.
- e. Belum optimalnya peran fungsi koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara, baik internal maupun eksternal.

b. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan

Isu dan permasalahan penanggulangan daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada:

1. Antisipasi dan penanganan bencana di wilayah Kutai Kartanegara
2. dikarenakan intensitas bencana yang cukup tinggi.
3. Pengendalian lingkungan sebagai wujud rehabilitasi dan rekontruksi sebagai



dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kutai Kartanegara

4. Isu perubahan pemanasan global (global warming) yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan, peningkatan permukaan laut, dan perubahan musim semakin tidak menentu sehingga menuntut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengurangan resiko bencana yang optimal.
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia aparatur dalam pelayanan sosial dasar, sehingga menurunkan kapasitas serta produktivitas kerja, kurangnya pendidikan, kesejahteraan pegawai.
6. Keberagaman entitas / kultur masyarakat di Kutai Kartanegara serta pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu kesenjangan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2016-2021, adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dengan sasaran
 - a. Memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana
 - b. Meningkatkan Pengkajian Risiko dan penyusunan Perencanaan Terpadu
 - c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik



2. Meningkatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan kebakaran dan bencana dengan sasaran
 - Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
3. Menurunnya Kerentanan atau Pengurangan Risiko Bencana dengan sasaran
 - a. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
 - b. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - c. Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
 - d. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Tabel. 13
Tujuan, Sasaran Jangka menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Kepuasan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	151	132	123	114	108	102



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra melalui Metode Analisis SWOT, yaitu *Strengths (S)*, *Weaknesses (W)*, *Opportunities (O)*, and *Threats (T)*. Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 14. Faktor Internal dan Eksternal .

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (Strength = S)	Peluang (Opportunities = O)
1. Memiliki aparatur yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. 2. Telah memiliki sarana dan prasarana dalam	1. Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan



<p>menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.</p> <p>3. Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana</p> <p>4. Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dan komunikasi melalui HT.</p>	<p>wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.</p> <p>2. Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya (pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan).</p> <p>3. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.</p> <p>4. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>
Kelemahan (Weakness = W)	Tantangan (Threats = T)
<p>1. Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas</p> <p>2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai</p> <p>3. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional</p> <p>4. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC</p> <p>5. Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap</p>	<p>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;</p> <p>2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana</p> <p>4. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;</p> <p>5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.</p>

Faktor internal dan eksternal yang telah disajikan pada Tabel 4.2. selanjutnya diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor. Setelah diperoleh nilai untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan penghitungan matriks internal dan matriks eksternal.

Tabel 15. Penghitungan Bobot dan Rating

Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan (S) :			
1. Memiliki aparatur yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.	25%	2.80	0.70
2. Kualitas sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana	25%	3.20	0.80



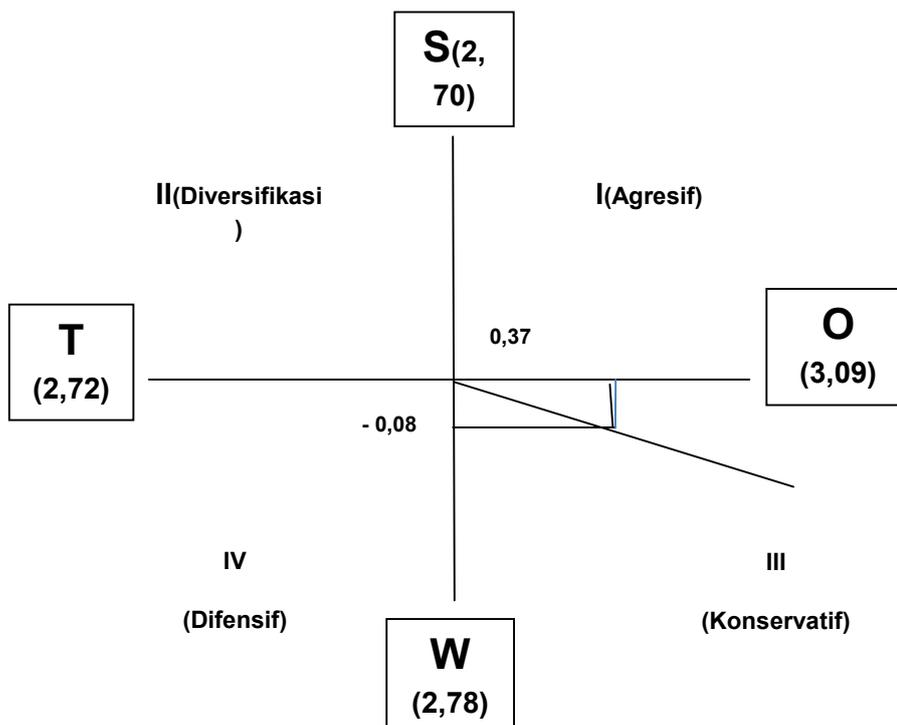
3.	Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana	30%	2.40	0.72
4.	Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dan komunikasi melalui HT.	20%	2.40	0.48
Jumlah		100%	10.80	2.70
Kelemahan (W)				
1.	Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas	25%	2.60	0.65
2.	Jumlah Sarana dan prasarana yang masih terbt	25%	3.20	0.80
3.	Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional	15%	2.80	0.42
4.	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC	20%	2.60	0.52
5.	Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap	15%	2.60	0.39
Jumlah		100%	13.80	2.78
Faktor Eksternal				
Peluang (O):				
1.	Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.	30%	3.40	1.02
2.	Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya (pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)	25%	3.20	0.80
3.	Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.	20%	2.60	0.52
4.	Partisipasi dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	25%	3.00	0.75
Jumlah		100%	12.20	3.09
Ancaman/Tantangan (T)				
1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;	20%	2.40	0.48
2.	Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.	30%	3.20	0.96
3.	Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana	20%	2.80	0.56
4.	Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;	15%	2.20	0.33



5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif	15%	2.60	0.39
Jumlah	100%	13,20	2,72
		S-W	-0.08
		O-T	0.37

Nilai matriks evaluasi internal adalah Total Kekuatan (S) - Total Kelemahan (W) = 2,70 - 2,78 = - 0,08. Sementara itu, Nilai matriks evaluasi eksternal adalah Total Peluang (O) - Total Ancaman (T) = 3,09-2,72 = 0,37. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut:

Gambar. 3. Diagram SWOT



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi



yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III: Memiliki peluang yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi yang dikembangkan yaitu strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O).

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel.16. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021

VISI	“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”
MISI	<i>Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat.</i>



Tujuan	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Kualitas Kepuasan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana dan kebakaran di segala aspek. Upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. b. Melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana dan kebakaran. 2. Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran yang handal dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, baik dari Instansi Pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun nasional maupun internasional 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam upaya pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat. b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja SDM aparatur yang berkualitas dan professional dalam rangka penanggulangan bencana; 2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkualitas kepada masyarakat; 3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 4. Memprioritaskan program yang mengarah pada koordinasi baik antar SKPD maupun masyarakat dan peningkatan partisipasi stakeholders dalam penanggulangan bencana dan kebakaran pada daerah rawan bencana.

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan



dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah rencana strategis agar dapat berjalan optimal dalam mencapai sasaran/tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 6 (enam) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Secara umum strategi dalam mencapai visi dan misi dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan strategis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kegiatan-kegiatan :

- 1) Pengadaan kendaraan penanggulangan kebakaran
- 2) Pemenuhan sarana damkar
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Satgas
- 4) Koordinasi Pengawasan Pengendalian Operasional Penanggulangan Kebakaran
- 5) Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan



- 6) Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana
- 7) Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran
- 8) Simulasi Pemadam Alat Api Ringan Tingkat pelajar
- 9) Sekolah Siaga Bencana (SSB)

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan-kegiatan:

- 1) Pembuatan Pos Siaga Penanggulangan Bencana
- 2) Pembuatan Baliho Informasi Kebencanaan

3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Kegiatan-kegiatan :

- 1) Penyusunan Data Base Penanggulangan Bencana
- 2) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
- 3) Pengadaan dan Pemasangan System Peringatan Dini (EWS) banjir
- 4) Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
- 5) Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan
- 6) Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan
- 7) Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana
- 8) Pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)
- 9) Revisi Instalasi Listrik
- 10) Penyusunan Rencana Kontinjensi

4. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Kegiatan-kegiatan:

- 1) Tanggap Darurat Bencana Kebakaran
- 2) Tanggap Darurat Bencana Alam/Non Alam
- 3) Koordinasi Penanggulangan Bencana
- 4) Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana
- 5) Pengerahan Peralatan /logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

5. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Kegiatan-kegiatan :

- 1) Rehabilitasi bagi korban bencana.
- 2) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- 3) Pengadaan hunian sementara dan kelengkapannya

6. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.

Kegiatan-kegiatan :

- 1) Verifikasi dan Pendataan Pasca Bencana
- 2) Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana



- 3) Monitoring dan Evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial tidak terencana
- 4) Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kegiatan-kegiatan :

- 1) Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
- 2) Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 3) Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 4) Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain-lain
- 5) Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 6) Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kebakaran
- 7) Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 8) Penguatan Organisasi dan Prosedurnya serta peningkatan Hubungan organisasi kemasyarakatan/usaha
- 9) Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tabel 17.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MISI I : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara																					
Tujuan 1 : Meningkatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana				I. Program Peningkatan kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		106%	100%	14,289,100,000	100%	8,000,000,000	100%	8,734,250,000	100%	9,362,010,000	100%	#### #### #### ###	100%	#### #### ####	100%	46,350,000,000	
	Meningkatnya sarana berupa perlengkapan dan peralatan Damkar	Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Water suply dan Damkar	1.	Pengadaan kendaraan penanggulangan kebakaran	- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran - Jumlah kendaraan Damkar dan Water Suplay Lokasi : BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara		12	12,031,596,000	4	6,050,000,000	4	6,050,000,000	5	6,850,000,000	5	6,850,000,000	5	6,850,000,000	23	32,650,000,000	Sekretariat



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Tersedianya Sarana Damkar		2. Pemenuhan Sarana Damkar	Rasio Kecukupan sarana Damkar per 10.000,- jiwa Lokasi : Kantor BPBD Kab. Kukar Jumlah sarana peralatan dan perlengkapan Damkar (stel/buah)	150	150	150,000,000	165	315,000,000	182	350,000,000	200	402,000,000	210	497,600,000	440	950,000,000	1,196	2,514,600,000	Sekretariat
	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang bersertifikasi.	Jumlah Aparatur PMK yang memenuhi Serifikasi		3. Pendidikan dan Pelatihan Satgas BPBD Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat : 185 orang Presentase Aparatur PMK yang memenuhi kualifikasi Lokasi : Diklat PMK Dalam / luar daerah		30%	1,250,000,000	10%	537,500,000	10%	544,000,000	10%	750,000,000	10%	750,000,000	10%	750,000,000	100%	3,331,500,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatnya kesiapsiagaan Instansi/SKPD, masyarakat dan dunia usaha/industri	Terlaksananya kegiatan pengamanan hari – hari besar/ tertentu		4. Koordinasi Pengawasan Pengendalian Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah pengamanan hari – hari besar/ tertentu Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara		6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	6	200,000,000	6	220,000,000	30	1,020,000,000	Bidang Pemadam Kebakaran



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terlaksananya Apel kesiapsiagaan Instansi/SKPD, Dunia Usaha, LSM dan masyarakat	5.	Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan	Jumlah Peserta Apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan Lokasi : Kabupaten Kukar		350	300,000,000	350	350,000,000	350	378,350,000	350	360,510,000	200	224,000,000	350	430,600,000	1,600	1,200,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Terbentuknya Forum PRB	6.	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Forum PRB Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara						1	233,560,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	783,560,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Terlaksananya pemeriksaan Tabung Apar	2.	Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	Jumlah Tabung APAR yang diperiksa	106	71	140,000,000	78	154,000,000	86	169,400,000	95	182,000,000	104	200,000,000	114	222,000,000	477	927,400,000	Bidang Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan unsur pendidik dan pelajar untuk mengantisipasi ancaman bencana	Terlaksananya Simulasi pemadam alat api ringan kepada pelajar	7.	Simulasi Pemadam Alat Api Ringan Tingkat pelajar	Jumlah Peserta Simulasi Pemadam APAR tingkat pelajar Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara		300	217,504,000	100	193,500,000	300	217,500,000	300	217,500,000	300	218,000,000	300	225,000,000	1,200	1,071,500,000	Bidang Pemadam Kebakaran
		Terlaksananya Sekolah Siaga bencana	8.	Sekolah Siaga Bencana	Jumlah Sekolah Siaga Bencana Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara				4	200,000,000	9	591,440,000	5	250,000,000	13	900,000,000	13	910,000,000	52	2,851,440,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tujuan 2 : Meningkatkan pencegahan, pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana,			II.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		50%	100%	2,538,080,000	100%	1,500,000,000	100%	1,637,670,000	100%	1,755,380,000	100%	1,882,419,000	100%	2,017,050,000	100%	11,330,599,000	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terbangunnya Pos Siaga Bencana		1. Pembuatan Pos Siaga Penanggulangan Bencana	Pos Siaga Penanggulangan Bencana		4	2,538,080,000	3	1,500,000,000	3	1,527,670,000	3	1,600,000,000	3	1,677,132,000	3	1,677,132,000	15	10,520,003,000	Sekretariat
	Ketersediaan Data/Informasi Kebencanaan	Tersedianya Baliho informasi kebencanaan		2. Pembuatan Baliho Informasi Kebencanaan	Papan Informasi Kebencanaan Lokasi : Kabupaten dan Kecamatan						10	110,000,000	13	155,380,000	20	205,298,000	25	339,918,000	68	810,596,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				III. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam		17%	100%	2,120,500,000	100%	2,000,000,000	100%	2,183,560,000	100%	2,340,510,000	100%	2,509,930,000	100%	2,689,400,000	100%	13,843,900,000	
		Tersusunnya data base Penanggulangan bencana		1. Penyusunan Data Base Penanggulangan Bencana	Jumlah Data Base Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara				1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Tersusunnya Dokumen RPB Kabupaten		2. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen RPB Kabupaten Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara				1	100,000,000	1	233,560,000			1	114,930,000	1	118,900,000	4	567,390,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Tersedianya System peringatan Dini (EWS) banjir		3. Pengadaan dan Pemasangan System Peringatan Dini (EWS) banjir	Deteksi Dini bencana Jumlah Unit Alat EWS yang terpasang		1	450,000,000			1	450,000,000	1	450,000,000	1	495,000,000	1	550,000,000	5	2,395,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terlaksananya informasi potensi bencana kepada Instansi/Dunia Usaha/Industri/masyarakat		4. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah informasi potensi bencana Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara	10	20	200,000,000	8	75,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	11	110,000,000	69	685,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat		5. Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan		200	350,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	200	350,000,000	200	350,000,000	225	380,000,000	825	1,730,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Terlaksananya pelatihan siaga bencana bagi masyarakat Desa/Kel		6. Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan	Jumlah masyarakat yang dilatih		450	720,500,000	100	100,000,000	100	100,000,000	110	240,000,000	110	240,000,000	110	240,000,000	530	1,640,500,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Terselenggaranya persiapan pembentukan Desa Tangguh Bencana		7. Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	Desa Tangguh Bencana Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara		3	400,000,000	3	400,000,000	3	400,000,000	4	450,510,000	4	445,000,000	5	500,000,000	23	2,595,510,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatnya pengendalian operasional penanggulangan bencana di Kab. Kutai Kartanegara	Terbangunnya Pusdalops		8. Pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)	Jumlah Pusdalops Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara				1	800,000,000									1	800,000,000	Sekretariat



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Mengurangi resiko kebakaran dengan revisi/rehabilitasi instalasi listrik	Terlaksananya Revisi Instalasi Listrik pada kantor/gedung/Rumah dinas/rumah pegawai/permukiman masyarakat	9.	Revisi Instalasi Listrik	Jumlah Dokumen Revisi Instalasi Listrik Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara				1	225,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	255,000,000	1	280,500,000	5	1,260,500,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jenis Potensi Bencana	Terlaksananya Rencana Kontinjensi	10.	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara				1		1	350,000,000	1	350,000,000	1	360,000,000	1	360,000,000	4	1,420,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			IV.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan							100%	4,517,120,000	100%	4,831,010,000	100%	5,254,830,000	100%	5,638,300,000	100%	26,341,260,000	
	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan	Terselenggaranya pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	1	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						150	417.972.200	150	417.972.200	150	417.972.200	150	417.972.200	60	600,000,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Terlaksananya informasi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Instansi/Dunia Usaha/Industri/masyarakat	2	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara						19	233,560,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	49	683,560,000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI				
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terlaksananya Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3	Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara						18	1.200,000,000	1	1.200,000,000	1	1.200,000,000	1	1.200,000,000	21	4,800,000,000	Bidang Pemadam Kebakaran
		Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain	4	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain-lain	JumlahRapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja lokasi : Jakarta, Kab. Kukar						10	528,525,400	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	25	1,278,525,400	Sekretariat
		Terlaksananya sPemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	5	Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan						100	700,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100%	1,230,000,000	Bidang Kedaruratan
		Tersediannya data Hotspot dan atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan	6	Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan						60	257,940,750	60	257,940,750	60	257,940,750	60	257,940,750	240	1,031,763,000	Bidang Kedaruratan
		Tersediannya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	7	Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan						239	6,446,264,221							239	6,446,264,221	Bidang Pemadam Kebakaran



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terbentuknya Hubungan organisasi kemasyarakatan /usaha	8	Penguatan Organisasi dan Prosedurnya serta peningkatan Hubungan organisasi kemasyarakatan/usaha	Jumlah organisasi kemasyarakatan/usaha								4	450,510,000	4	445,000,000	5	500,000,000	252	1,795,510,000	Bidang Pemadam Kebakaran
		Tersediannya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	9	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan								4	450,510,000	4	445,000,000	5	500,000,000	252	1,795,510,000	Bidang Pemadam Kebakaran
MISI II : Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana																					
Meningkatkan Upaya Tanggap Darurat Bencana			V.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana			100%	2,600,000	100%	2,000,000	100%	2,183,560,000	100%	2,340,500,000	100%	2,509,900,000	100%	2,689,400,000	100%	14,323,360,000	
	Meningkatnya efektifitas penanganan kedaruratan bencana	Terlaksananya tanggap darurat bencana kebakaran	1	Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	Cakupan Tanggap Darurat	89%	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	850,000	100%	900,000	100%	4,750,000	Bidang Pemadam Kebakaran
					Jumlah Persentase tanggap darurat bencana																
					Lokasi : Kab.Kutai Kartanegara																



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Terlaksananya tanggap darurat bencana alam/non alam		2 Tanggap Darurat Bencana Alam/ Non Alam	Tingkat Waktu Tanggap Jumlah tingkat waktu tanggap darurat bencana Lokasi : Kab.Kutai Kartanegara		100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	4,750,000,000	Bidang Kedaruratan
		Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana		3 Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Koordinasi Penanggulangan Bencana		18	150,000,000		0	18	200,000,000	18	240,500,000	18	200,000,000	18	220,000,000	90	1,010,500,000	Bidang Kedaruratan
		Terlaksananya penentuan Kebutuhan dan Tindakan yang tepat pada saat tanggap darurat		4 Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Terwujudnya jumlah optimalisasi TRC Penanganan Bencana di Kab. Kutai Kartanegara		100	250,000,000		-		-		100,000,000		109,900,000		120,890,000	100	580,790,000	Bidang Kedaruratan
	Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana	Terlaksananya Pengerahan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar		5 Pengerahan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar	Jumlah Paket Bantuan Logistik dan kebutuhan dasar Lokasi : Lokasi / Daerah terkena dan terdampak bencana		1265	700,000,000	600	500,000,000	500	483,560,000	550	500,000,000	605	500,000,000	666	548,510,000	4186	3,232,070,000	Bidang Kedaruratan

MISI III : Meningkatkan upaya perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali prasarana, sarana kelembagaan pemerintahan/masyarakat pada wilayah pascabencana



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Tujuan 1 : Percepatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat (kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi) pada wilayah pasca bencana				VI. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		2%			100%	710,000,000	100%	776,890,000	100%	839,230,000	100%	1,006,990,000	100%	1,089,811,000	100%	4,522,921,000			
	Berfungsinya kembali sarana/prasarana (fasilitas umum) dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana.	Terlaksananya Rehabilitasi Fasum bagi korban bencana	1.	Rehabilitasi bagi korban bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Jumlah persentase Kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara				10%	250,000,000	11%	275,000,000	12%	302,500,000	13%	332,750,000	15%	366,025,000	61%	1,526,275,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
		Terlaksananya bantuan perbaikan rumah masyarakat	2.	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Jumlah hunian yang dibantu Lokasi : Lokasi / Daerah terkena bencana		50	100,000,000	60	210,000,000	60	231,000,000	60	254,100,000	60	379,510,000	60	417,461,000	350	1,592,071,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
	Terbangunnya hunian sementara bagi korban bencana	Terlaksananya Pengadaan hunian sementara dan kelengkapannya	3.	Pengadaan hunian sementara dan kelengkapannya	Hunian sementara korban bencana Lokasi : Kab.Kutai Kartanegara					1	250,000,000	1	270,890,000	1	282,630,000	1	294,730,000	1	306,325,000	5	1,404,575,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				VII . Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial			100%		100%		100%	860,780,000	100%	916,150,000	100%	875,440,000	100%	927,239,000	100%	4,669,609,000			
	Meningkatnya penanganan keadaan darurat secara cepat dan tepat.	Terlaksananya kegiatan Verifikasi dan pendataan pascabencana	1.	Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana	Cakupan Verifikasi dan pendataan pascabencana Lokasi : Kab.Kutai Kartanegara	70	75	200,000,000	75	300,000,000	75	260,780,000	75	250,000,000	75	275,440,000	75	327,239,000	450	1,613,459,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
		Terselenggaranya Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	2.	Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Lokasi : Dalam/Luar Daerah				20	300,000,000	20	200,000,000	20	266,150,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	1,166,150,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kepada Masyarakat penerima bantuan sosial tidak terencana	3.	Monitoring dan Evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan sosial tidak terencana	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Lokasi : Kab.Kutai Kartanegara		70	100,000,000	70	190,000,000	70	100,000,000	70	100,000,000	70	100,000,000	70	100,000,000	420	690,000,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
		Tersusunnya Dokumen JITU Pasca Bencana	4.	Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Jumlah Dokumen JITU Pasca Bencana Lokasi : Lokasi / Daerah terkena & terdampak bencana						1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	4	1,200,000,000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Tujuan 1: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Peraturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara	Terselesaikannya pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara		VII.1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			100%													100%	384,543,800	
			1.	Pembuatan Produk Hukum daerah tentang penanggulangan Bencana	Jumlah produk Hukum daerah tentang Penanggulangan Bencana		2	384,543,800												2	384,543,800	Sekretariat
	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran di SKPD Penanggulangan Bencana Kab. Kutai Kartanegara	1. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		IX. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		77%	100%	5,257,050,000	100%	5,500,000,000	100%	6,004,800,000	100%	6,436,380,000	100%	6,902,230,000	100%	7,395,850,000	100%	37,496,310,000		
			1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai 6000 dan 3000	1,900	2,950	15,400,000	933	4,800,000	933	4,800,000	933	4,800,000	933	4,800,000	933	4,800,000	7,615	39,400,000	Sekretariat	
			2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran	14	3	242,800,000	14	242,800,000	14	267,080,000	14	293,788,000	14	323,166,800	14	355,483,480	73	1,725,118,280	Sekretariat	
			3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	9	60	162,000,000	60	162,000,000	60	178,200,000	60	196,020,000	60	215,622,000	60	237,184,200	360	1,151,026,200	Sekretariat	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional	17	36	65,000,000	36	65,000,000	36	65,000,000	36	65,000,000	36	65,000,000	36	65,000,000	216	390,000,000	Sekretariat
				5. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Aparatur yang dibayar	24	33	417,873,400	33	417,873,400	33	459,660,740	33	505,626,814	33	556,189,495	33	611,808,445	198	2,969,032,294	Sekretariat
				6. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor	9	45	72,000,000	50	79,200,000	54	87,120,000	60	95,832,000	66	105,415,200	72	115,956,720	347	555,523,920	Sekretariat
				7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	2	2,768	194,171,200	3,045	195,263,085	3,349	195,200,000	3,684	214,720,000	4,053	236,192,000	4,458	259,811,200	21,357	1,295,357,485	Sekretariat
				8. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan penggandaan	26,286	2,765	135,750,000	2,765	135,750,000	2,765	135,750,000	2,765	135,750,000	2,765	135,750,000	2,765	135,750,000	16,590	814,500,000	Sekretariat
				9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		100	20,500,000	100	20,500,000	100	20,500,000	100	20,500,000	100	20,500,000	100	20,500,000	60	123,000,000	Sekretariat
				10. Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	4	887	55,000,000	887	55,000,000	887	35,000,000	887	55,000,000	887	55,000,000	887	55,000,000	5,322	310,000,000	Sekretariat
				11. Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Jumlah makanan dan minuman Rapat	5,770	3,000	198,000,000	3,000	198,000,000	3,000	198,000,000	3,000	198,000,000	3,000	198,000,000	3,000	198,000,000	18,000	1,188,000,000	Sekretariat
				12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	450	225	2,300,623,360	225	2,300,623,360	360	2,602,192,145	360	2,602,192,145	360	2,933,849,764	360	3,279,858,144	1,665	16,019,338,918	Sekretariat



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	98	50	1,030,532,040	50	1,273,090,155	50	1,233,227,115	50	1,522,814,041	50	1,522,814,041	50	1,522,814,041	300	8,105,291,433	Sekretariat
				14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	60	162,000,000	60	162,000,000	60	162,000,000	60	162,000,000	60	162,000,000	60	162,000,000	360	972,000,000	Sekretariat
				16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	23,662	2,190	58,400,000	2,190	58,400,000	2,190	58,400,000	2,190	58,400,000	2,190	58,400,000	2,190	58,400,000	13,140	350,400,000	Sekretariat
				17. Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana	Jumlah Satgas yang di Asuransikan	225	225	100,000,000	225	100,000,000	360	270,000,000	360	270,000,000	360	270,000,000	360	270,000,000	1,665	1,280,000,000	Sekretariat
				18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Khusus hari-hari tertentu	2	2	27,000,000	2	29,700,000	2	32,670,000	2	35,937,000	2	39,530,700	2	43,483,770	12	208,321,470	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		X. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		93%	100%	7,507,710,000	100%	1,000,000,000	100%	1,091,780,000	100%	1,170,250,000	100%	1,254,950,000	100%	1,344,700,000	100%	13,369,390,000	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	86,650	30	1,281,501,610	30	825,000,000	40	916,780,000	50	995,250,000	30	1,079,950,000	30	1,169,700,000	210	6,268,181,610	Sekretariat	
				2. Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional		30	150,000,000												150,000,000	Sekretariat	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2	30	57,500,000	5	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	115	282,500,000	Sekretariat	
				3. Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana	522	228	1,750,000,000												228	1,750,000,000	Sekretariat
				4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		50	1,233,227,115												50	1,233,227,115	Sekretariat
				5. Cut and Fill Pematangan Lahan	Jumlah Lahan Gedung Kantor		1	600,000,000												1	600,000,000	Sekretariat
				6. Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor		1	800,000,000												1	800,000,000	Sekretariat



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				7	Semenisasi Halaman Gedung Kantor dan Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	Jumlah Halaman Gedung Kantor dan Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	2	400,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	7	800,000,000	Sekretariat	
				8	Pengadaan sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	228	175,000,000											228	175,000,000	Sekretariat	
				9	Pengelolaan Website BPBD	Jumlah Website BPBD	1	155,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	250,155,000	Sekretariat	
				10	Asuransi BMD BPBD	Jumlah Aset BPBD yang di Asuransikan	20	230,000,000											20	230,000,000	Sekretariat	
				11	Pengadaan Kendaraan Penanggulangan bencana	Jumlah Kendaraan Operasional	2	830,326,275								2	830,326,275	2	830,326,275	6	830,326,275	Sekretariat
				12	Pengelolaan dan Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola								1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Sekretariat
				XI.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	2,693,640,000											100%	2,693,640,000		
				1	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari - hari tertentu	948	1,914,000,000											948	1,914,000,000	Sekretariat	
				2	Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya	303	464,640,000											303	464,640,000	Sekretariat	



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan		205	205,000,000										205	205,000,000	Sekretariat	
				4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI		110	110,000,000										110	110,000,000	Sekretariat	
	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur		XII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	490,000,000	100%	200,000,000	100%	218,360,000	10%	234,050,000	100%	250,990,000	100%	268,940,000	100%	1,662,340,000	Sekretariat	
				1.	Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal		30	380,000,000	4	100,000,000	5	118,360,000	6	130,000,000	7	146,940,000	8	164,890,000	60	1,040,190,000	Sekretariat
				2.	Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Jasmani dan Siraman Rohani		100	110,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	10	104,050,000	100	104,050,000	100	104,050,000	60	622,150,000	Sekretariat
				3.	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Manajemen Perubahan								1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000	Sekretariat
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Instansi	Terwujudnya dokumen perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Instansi		XII I.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		42%	100%	1,373,500,000	100%	145,000,000	100%	263,770,000	10%	250,540,000	100%	263,240,000	100%	276,710,000	100%	2,572,760,000	
				1.	Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Laporan keuangan		31	120,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	20	20,000,000	80	240,000,000	Sekretariat



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Target	Rp	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2. Penyusunan Dokumen perencanaan laporan kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen RKT/Renja, LPPD,LKjP/Lakip, RKA/DPA	1000	5	180,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	3	20,000,000	19	300,000,000	Sekretariat
				3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64	1	220,000,000	1	25,000,000	1	38,770,000	1	38,770,000	1	51,470,000	1	35,000,000	5	409,010,000	Sekretariat
				4. Fasilitasi pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD		6	220,000,000	1	35,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	40,000,000	5	445,000,000	Sekretariat
				5. Penyusunan Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra		1	200,000,000	1	35,000,000							1	65,000,000	3	300,000,000	Sekretariat
				6. Penyusunan Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah		252	298,500,000			50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	10,000,000	452	383,500,000	Sekretariat
				7. Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Pameran/ Publikasi Kinerja SKPD		2	135,000,000					1	11,770,000	1	11,770,000	1	11,710,000	5	170,250,000	Sekretariat
				8. Inventarisasi BMD	Jumlah Aset BPBD yang di Inventaris						100	100,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	103	325,000,000	Sekretariat



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana strategis BPBD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu **Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat**. Kontribusi setiap Perangkat Daerah tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja Perangkat Daerah, sehingga capaian setiap Perangkat Daerah akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, BPBD memiliki peran untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mewujudkan kebijakan Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan gangguan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.



Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel.18
**Tujuan, Sasaran Jangka menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Kepuasan Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	151	132	123	114	108	102



Tabel.19
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkatan Kepatuhan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Deteksi Dini Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Perubahan-RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
10	Persentase Penagnan Bencana	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Hunian Yang Mendapat Bantuan	50	50	60	60	60	60	60	350



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang Penanggulangan Bencana / Urusan Bencana untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Perubahan Rencana Strategis ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
3. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah.
4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.



b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

c. Rencana tindak lanjut

Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Resntra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis s K/L untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.



Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimasa yang akan datang. Bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penanggulangan Bencana dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !!!!!!!!!

Salam Tangguh.....

Tenggarong, Oktober 2018

Kepala Pelaksana,

Drs. H. MARSIDI

NIP. 19620403 198703 1 020